

KOMISI V DPR-RI DAN BUPATI BOGOR MENGAPRESIASI

Proyek Pembangunan Jembatan Cikereteg Selesai Awal Oktober

CIBINONG (IM) - Komisi V DPR-RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Bogor, kali ini pusat kunjungan di proyek pembangunan Jembatan Cikereteg, Ciawi-Caringin.

“Saat kunjungan spesifik ini kami meninjau proyek pembangunan Jembatan Cikereteg, Ciawi-Caringin. Proyek ini berjalan baik dan pada awal Bulan Oktober akan dua halur jembatan ini baik yang ke arah Sukabumi maupun Bogor akan difungsionalkan dari saat ini baru satu jalur,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Robert Rouw kepada wartawan, Kamis (14/9).

Robert Rouw menuturkan bahwa Jembatan Cikereteg sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hingga pasca terdampak bencana alam gempa bumi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu) melalui Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Jakarta-Jawa Barat langsung melakukan penanganan.

“Dengan berbagai hambatan, kami tetap mengapresiasi Kemenpu dan jajaran dalam penanganan Jembatan

Cikereteg yang sebelumnya longsor (di jalur ke arah Bogor) karena kaki lihat memang tidak mudah,” tuturnya.

Anggota Komisi V DPR-RI Mulyadi menerangkan bahwa Kemenpu menggelontorkan anggaran sebesar Rp 56,9 miliar untuk pembangunan Jembatan Cikereteg.

“Walaupun ada addendum atau tambahan waktu, kami anggap masih wajar. Dan semoga proyek ini bisa selesai dua bulan sebelum Tahun Baru 2024,” terang Legislator asal Jonggol, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan berterima kasih kepada koleganya di Partai Gerindra yaitu Mulyadi, lalu Komisi V DPR-RI, Kemenpu dan BBPJN Jakarta-Jawa Barat hingga pembangunan Jembatan Cikereteg berjalan lancar.

“Kami berterima kasih, pasca longsor, penanganannya oleh Komisi V DPR-RI dan Kemenpu sangat cepat dan mudah-mudahan proyek pembangunan atau rekonstruksi Jembatan Cikereteg bisa selesai di Bulan Oktober mendatang,” kata Iwan Setiawan. ● **gio**

Disdagin Kab. Bogor Sidak Rumah Makan dan Resto Gas LPG Bersubsidi



Pembab Bogor sidak rumah makan yang masih menggunakan gas LPG Bersubsidi.

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pembab) Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap rumah makan dan restoran yang masih menggunakan gas LPG bersubsidi. Hasilnya ditemukan restoran yang menggunakan Gas LPG 3 Kg.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Tertib Niaga Disdagin Kabupaten Bogor, Anton Sudjana usai melaksanakan sidak di Kecamatan Sukaraja dan Cibinong, Rabu (13/9).

Anton menjelaskan, Disdagin Kabupaten Bogor bersama Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap rumah makan dan restoran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007.

Soal penyediaan, pendistribusian, dan penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Serta Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No. B-2461/JG.05/DJM/2022 tentang Larangan Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bagi Usaha.

“Kami turun melakukan sidak secara langsung ke beberapa rumah makan dan restoran di dua kecamatan. Jadi intinya kami mengedukasi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha menggunakan gas LPG tabung 3 Kg yang merupakan gas bersubsidi,” jelas Anton.

Anton mengungkapkan, atas temuan tersebut pihaknya memberikan edukasi kepada yang pihak restoran dan diminta untuk segera menukar dengan gas LPG non subsidi.

“Pihak Pertamina juga menyiapkan gas LPG non subsidi, dan bilamana ada yang kedapatan menggunakan gas LPG bersubsidi harus segera diganti dengan gas berukuran tabung 5 Kg atau 12 Kg,” ungkap Anton.

la menambahkan, kedepan kegiatan ini akan terus berlanjut dengan melibatkan beberapa perangkat daerah, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan harapan kegiatan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bogor.

“Semoga kedepan tidak ada lagi rumah makan, restoran, dan kegiatan usaha lainnya yang menggunakan gas LPG tabung 3 Kg atau tabung gas bersubsidi,” ujarnya. ● **gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PEMERINTAH TARGETKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN TEH Pekerja menuang daun teh yang telah dipetik di Perkebunan Teh Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9). Pemerintah menargetkan produktivitas kebun teh kembali meningkat menjadi 1 juta ton/hektar pada tahun 2023 dimana jumlah tersebut dianggap ideal agar petani dapat mencapai nilai keekonomian yang tinggi.

Dewan Sebut Dunia Pendidikan Kota Bogor Sudah Porak Poranda

Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang di atas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lips service’ belaka,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani.

BOGOR (IM) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani merasa miris dengan dunia pendidikan di Kota Bogor, baru saja ada kasus perbuatan cabul oleh guru terhadap murid SD, muncul kembali adanya kasus dugaan pungli yang melibatkan Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum.

Akibat aksi pungli tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya langsung mencopot Kepspek itu dari jabatannya pada Rabu (13/9).

“Saya merasa miris. Kare-

na belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD. Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang di atas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lips ser-

vice’ belaka,” ungkap Devie, Kamis (14/9).

Devie memaparkan, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abuse of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lips Service saja.

Sujatmiko Baliarto, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, harus bertanggung jawab. Pasalnya sejak dipimpin Sujatmiko, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi,

terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD,” papar politisi Nasdem ini.

Devie membeberkan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan cabul sejak 2022. Ia merasa prihatin kepada para korban, karena sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” tegas Devie.

Devie berpendapat, predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini

jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” jelas Devie.

“Dengan adanya kecauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggung jawab,” tambah Devie. ● **yan**

Pembab Bogor Antisipasi Dampak Kekeringan di Sektor Peternakan dan Perikanan

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pembab) Bogor melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) melakukan langkah untuk antisipasi dampak kekeringan di sektor peternakan dan perikanan.

Langkah antidisipasi dimaksudkan guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat, serta mengurangi kerugian yang lebih besar.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Nurhayati memberikan keterangannya saat di wawancara, Rabu (13/9).

Disampaikan, pada sektor peternakan, upaya yang dilakukan berupa penyediaan air dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) karena ini adalah masalah yang dihadapi peternak. Beberapa solusi dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya dengan pemanfaatan limbah sayuran sisa pasar. Selain itu, Pembab Bogor membantu pengembangan unit usaha pengolahan limbah pasar sebagai pakan ternak.

Untuk mengantisipasi ketersediaan hijauan pakan saat musim kemarau melalui pengolahan dan pengawetan dengan pembuatan silase dan hay atau pengeringan dan melakukan pengembangan Bank Pakan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan pakan kepada petani milenial komoditas kambing, domba, sapi dan HPT,” jelas Nurhayati.

Dalam menghadapi musim kemarau yang berdampak pada sektor perikanan, berbagai upaya antisipasi pun disiapkan di antaranya, memindahkan induk ikan yang berkualitas ke lokasi yang tidak mengalami kekeringan ekstrem.

“Peralihan dari kegiatan pembenihan ikan ke pembenihan ikan, karena membutuhkan air yang lebih sedikit. Selain itu ketika musim hujan tiba, permintaan benih ikan akan meningkat sehingga kegiatan pembenihan pada musim kemarau dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Nurhayati melanjutkan, kemudian pengurangan pada



Pembab Bogor antisipasi sejumlah langkah bagi yang terdampak kekeringan di sektor peternakan dan perikanan.

tebar ikan, serta memilih jenis ikan yang tahan terhadap kondisi air yang kurang optimal, seperti ikan lele dan ikan nila. Jenis ikan ini dapat bertahan hidup di air yang memiliki kadar oksigen rendah, suhu tinggi, dan salinitas tinggi.

“Juga mempercepat panen ikan untuk meminimalisir kerugian, penggunaan multivitamin dan probiotik pada sistem budidaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap potensi serangan penyakit ikan dan melakukan

sosialisasi sistem budidaya perikanan hemat air, salah satunya inovasi dari penyuluh perikanan swadaya di Kecamatan Kemang dengan sistem Super Six Intensive Urban Aquaculture,” terangnya.

Dia menyakinkan, penanganan dampak kekeringan pada sektor perikanan dan peternakan tentunya dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi jajaran perangkat daerah dan stakeholder terkait. Salah satunya dukun-

gan lintas sektoral untuk perbaikan saluran-saluran irigasi ke lokasi sentra atau kawasan budidaya ikan, sehingga produksi perikanan tetap terjaga.

Dinas Perikanan dan Peternakan akan terus berupaya meningkatkan produksi budidaya perikanan baik ikan hias, ikan konsumsi, maupun pembenihan, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan Kabupaten Bogor,” tuturnya. ● **gio**

Bupati Bogor Minta Masyarakat Tidak Panik Hadapi Kekeringan

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta masyarakat tidak panik menghadapi bencana kekeringan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pembab) Bogor siap memberikan pertolongan pertama pengadaan air bersih untuk masyarakat terdampak bencana kekeringan.

Hal ini disampaikan Bupati Bogor didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan saat melakukan Bogor Keliling (Boling) Saba Desa di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Rabu (13/9).

Iwan Setiawan menjelaskan, pertolongan pertama pengadaan air bersih untuk masyarakat terdampak bencana kekeringan secara rutin

dilakukan secara kolaborasi antara BPBD, Disdamkar, PMI, Perumda Tirta Kahuripan dan perusahaan swasta, berdasarkan hasil permintaan masyarakat melalui call center tanggap darurat bencana kekeringan permohonan pendistribusian air.

“Insya Allah Pemda siap memenuhi kebutuhan air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus (MCK) masyarakat, dan saya minta masyarakat jangan panik, suplai air dengan cepat kita distribusikan, dan ini jadi komitmen kami untuk mengoptimalkan penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah debit air di Cisdane juga masih bagus untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi

masyarakat,” tegas Iwan Setiawan.

Tidak hanya itu, penanganan bencana kekeringan juga dilakukan kepada wilayah pertanian yang terdampak kekeringan. Salah satunya melalui penanganan jangka panjang berupa pembangunan embung penampung hujan dan pipanisasi Perumda Tirta Kahuripan untuk sawah dan bendungan terutama di wilayah Bogor Barat.

“Ini penting, karena menurut BMKG kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2023. Kami juga minta DPKPP untuk segera optimalisasi pembangunan toren-toren air agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana

di wilayah Kecamatan Parung Panjang,” ungkap Bupati Bogor.

Selanjutnya, Camat Parung Panjang, Icang Aliyudin menyatakan, terimakasih kepada Bupati Bogor bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor dan jajaran Pembab Bogor yang telah berkenan hadir melakukan Boling di wilayah Kecamatan Parung Panjang, untuk mendorong kemajuan masyarakat dan pembangunan di Parung Panjang.

“Terimakasih atas petunjuk arahan yang diberikan, tentunya ini sangat mendukung terhadap perbaikan Parung Panjang lebih baik kedepannya,” puji Icang. Perlu diketahui, pada Bol-



Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta masyarakat tidak panik menghadapi kekeringan.

ing kali ini beberapa rangkaian kegiatan dilakukan Bupati Bogor antara lain. Penandatangan prasasti SAMISADE, penyerahan simbolis bantuan bibit pertanian dan penyerahan simbolis bantuan toren

air di Desa Parung Panjang. Selanjutnya, Iwan Setiawan juga berkesempatan meresmikan Tembok Penahan Tanah (IPT) program Samisade di Desa Pingku ditandai dengan Penan-

datangan Prasasti yang kemudian meninjau langsung Lokasi Millennium City. Boling diakhiri dengan kegiatan peninjauan langsung UMKM dan pelayanan masyarakat di Desa Kabasaran. ● **gio**